EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Rully Dwiyanto[1] dan Nur Indah Lestari [2*]
[1]Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II; Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
[2]Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
*e-mail : indah@pknstan.ac.id

Artikel Info

Received :
30 November 2023
Revised :
9 December 2023
Accepted :
15 December 2023

Kata Kunci :
Kredit Usaha Rakyat, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Panel VAR

Keywords :
Micro Credit Program, Economic Growth, Poverty, Panel VAR

ABSTRAK

Sebagai salah satu program pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, KUR, diluncurkan untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di berbagai sektor usaha di Indonesia. Salah satu sektor strategis yang dituju oleh KUR adalah sektor pertanian. Penelitian ini menganalisis hubungan antara KUR yang diberikan ke sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan ekonomi agregat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan antara KUR sektor pertanian terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia baik secara keseluruhan maupun yang ada di pedesaan. Dengan menggunakan data 34 provinsi selama tahun 2010-2017 dan menerapkan metode *Panel Vector Autoregressive*, hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR sektor pertanian memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 0.025%, namun tidak signifikan secara agregat. Lebih lanjut lagi, KUR juga berdampak signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0.017%, namun tidak signifikan di pedesaan.

The Effect of Micro Credit Program (KUR) Through Agricultural Sector on Economic Growth and Poverty in Indonesia

ABSTRACT

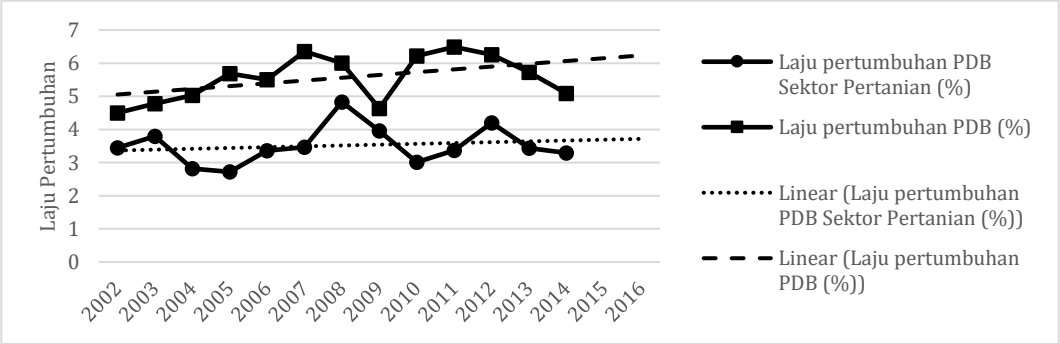
As one of government program, Micro Credit Program, called KUR, is launched to tackle the capital problem faced by Small Medium Enterprises (SMEs) in various business sectors in Indonesia. One of targeted sector by KUR is agricultural sector. This study analyzed the effect of KUR given to the agricultural sector on the economic growth both in the agricultural sector and the aggregate economy in Indonesia. In addition, this study also considered the relationship between the KUR given to the agricultural sector on the poverty reduction in Indonesia in whole as well as in rural areas. Using panel data set of 34 provinces in Indonesia in

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

2010-2017 and applying Panel-Vector Autoregressive method, the results shows that the KUR given to the agricultural sector had a significantly positive impact on economic growth in agricultural sector as much 0.025%, but insignificant in aggregate. Furthermore, KUR had an impact on the aggregate poverty reduction 0.017% in Indonesia, but insignificant in rural area.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor strategis di Indonesia. Sektor ini pernah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan porsi 45% dari total PDRB Indonesia pada tahun 1970 dan menyerap 67% tenaga kerja, namun jumlah ini terus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi Indonesia yang dimulai pada awal tahun 1970-an (Suryahadi *et al.*, 2008). Pada tahun 2016, sektor pertanian hanya meraih porsi 13.47% dari PDB. Lebih lanjut lagi, tren laju pertumbuhan PDB sektor pertanian tampak stagnan dari tahun 2002-2014 seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.

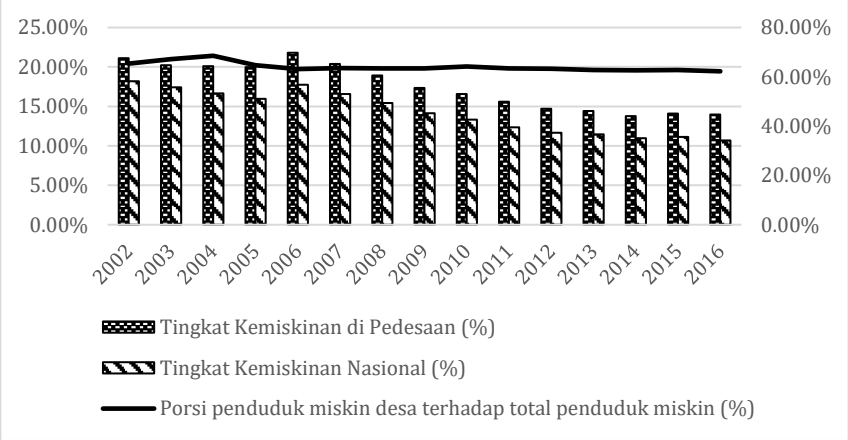


Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2018.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB dan PDB Sektor Pertanian 2002-2014

Stagnasi pertumbuhan sektor pertanian ini tentu akan berdampak pada rencana strategis pemerintah, salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 16,31 juta orang dari 26,58 juta total penduduk miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 13,47% sementara tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12%, Gambar 2. Angka ini masih berada di atas target pemerintah. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di *level* 8,5-9,5% pada tahun 2017.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635



Sumber: Diolah dari BPS, 2018.

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Indonesia (kiri) dan Porsi Penduduk Miskin di Pedesaan (kanan) Terhadap Total Penduduk Miskin

Sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Suryahadi *et al.* (2008) dan Hermawan (2012), pertumbuhan sektor pertanian berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di daerah pedesaan sekaligus menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan secara agregat. Selain itu, sektor pertanian memberikan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi (Zhuang *et al.*, 2009 dan Lewis, 1954) dan meningkatkan penghasilan para petani (Mellor dan Ranade, 2006). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar pertumbuhannya melaju dengan cepat.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian antara lain masalah konversi lahan, infrastruktur irigasi yang masih belum optimal, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta masalah permodalan dan pembiayaan kredit. Faktor pembiayaan menjadi penting untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan faktor pembiayaan berfungsi sebagai salah satu fungsi produksi dan berperan dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pertanian dalam menjalankan usahanya sehingga produksinya menjadi optimal (Nugroho, 2016).

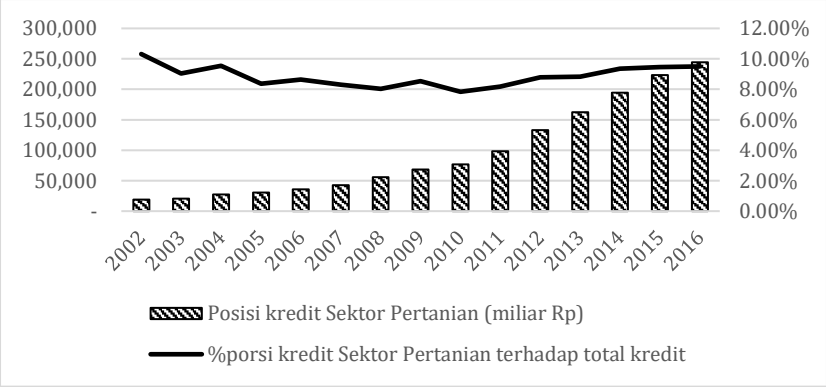
Dalam rangka menyelesaikan masalah pembiayaan, pemerintah telah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk meluncurkan beberapa kredit program bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Kredit program ini telah dilaksanakan sejak awal Pelita I melalui program Bimas (Bimbingan Masal) pada tahun 1964. Kredit program ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan permodalan pelaku usaha pertanian yang dianggap masih sangat berisiko oleh perbankan. Kredit program diharapkan menjadi pemicu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar "naik kelas" (Kloppenburg, 2009), sehingga tidak terus mengharapkan bantuan modal dari pemerintah. Dengan demikian, sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh dengan pesat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan secara agregat.

Telah banyak penelitian di luar negeri yang membahas pengaruh penyaluran kredit program ke sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan antara lain Akram *et al.* (2008) dan Rehman *et al*. (2017) di Pakistan serta Simsir (2012) di Turki. Mayoritas penelitian menggunakan *time series* dengan *Ordinary Lesat*

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Square (OLS) (Hermawan ,2012; Simsir, 2012) dan Rehman *et al.,* 2017), dan spesifik pada regresi *Vector Autoregression* VAR (Akram *et al.,* 2008).

Kredit program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia terbagi ke dalam dua model skema pembiayaan, yaitu skema Subsidi Bunga dan Penjaminan Risiko (Nugroho, 2016). Kredit program yang memakai skema Subsidi Bunga antara lain Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang saat ini telah dihentikan. Sementara yang memakai skema Penjaminan Risiko adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, sampai 2016 porsi pembiayaan ke sektor pertanian dinilai masih minim yakni tidak sampai 10% dari total kredit yang disalurkan perbankan, Gambar 3.



Sumber : Diolah dari Bank Indonesia, 2018.

Gambar 3. Posisi Kredit Sektor Pertanian (sisi kiri) dan Porsinya Terhadap Total Kredit yang Disalurkan (sisi kanan) 2002-2016

Momentum akselerasi penyaluran kredit pertanian ini tentu saja perlu dikawal dengan baik. Kredit yang diberikan ke sektor pertanian khususnya yang berasal dari KUR akan berimplikasi pada anggaran belanja pemerintah. Semakin besar KUR yang diberikan, semakin besar pula beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh KUR terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregate maupun pada sektor pertanian serta sekaligus seberapa besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di pedesaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan terkait efektivitas pemberian kredit sektor pertanian dalam menumbuhkan ekonomi, produksi pertanian dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Data ini dikeluarkan resmi oleh BPS, Kemenko Bidang Perekonomian dan DJPb dalam periode 2010-2017 di 33 provinsi Indonesia. Meskipun sejak tahun 2015 ada 34 provinsi, namun untuk menjaga kesinambungan data yang digunakan, data provinsi Kalimantan Utara dilebur dengan data Kalimantan Timur sehingga pengamatan tetap berjumlah 33 provinsi. Variabel terikat yang digunakan adalah PDRB, PDRB sektor pertanian, jumlah penduduk miskin agregat, dan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Sementara, variabel bebas

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

utama adalah KUR sektor pertanian dan variabel kontrol adalah jumlah hasil panen. Variabel-variabel tersebut dirangkai menjadi model penelitian seperti pada Akram et al., (2008) sebagai berikut:

$$LGRDP_{it} = \alpha_{i0} + \beta_1 LKUR_{it} + \beta_3 LPROD_{it} + \varepsilon_{i,t} \quad \ldots..(1)$$
$$LAGRDP_{it} = \alpha_{i0} + \beta_1 LKUR_{it} + \beta_3 LPROD_{it} + \varepsilon_{i,t} \quad \ldots..(2)$$
$$LPO_{it} = \alpha_{i0} + \beta_1 LKUR_{it} + \beta_3 LPROD_{it} + \varepsilon_{i,t} \quad \ldots..(3)$$
$$LRPO_{it} = \alpha_{i0} + \beta_1 LKUR_{it} + \beta_3 LPROD_{it} + \varepsilon_{i,t} \quad \ldots..(4)$$

Keterangan:

LGRDP	= Logaritma natural dari PDRB seluruh sektor
LAGRDP	= Logaritma natural dari PDRB sektor pertanian
LPO	= Logaritma natural dari jumlah penduduk miskin agregat
LRPO	= Logaritma natural dari jumlah penduduk miskin di pedesaan
LKUR	= Logaritma natural dari KUR sektor pertanian
LPROD	= Logaritma natural dari jumlah hasil panen
α_{i0}	= konstanta
ε	= *error*

Keempat model diuji menggunakan Panel *Vector Autoregression* (VAR). Panel VAR merupakan metode pengujian yang menggunakan uji VAR, yang biasa digunakan dalam pengujian ekonometrik *time series*, ke dalam data panel (Abrigo dan Love, 2015).

Langkah pengujian panel VAR adalah, **pertama**, uji dependensi *cross sectional* (Bhattacharya, 2015) dengan menggunakan Pesaran CD. **Kedua**, uji stasioneritas data menggunakan uji *unit root* sedangkan kestabilan estimasi akan dilihat melalui nilai Eigen yang dihasilkan oleh estimasi model (Abrigo dan Love, 2015). Uji *unit root* menggunkan *Augmented Dickey-Fuller Test* untuk variabel yang tidak terdapat dependensi *cross sectional* sedangkan variabel yang memiliki dependensi *cross sectional* menggunakan uji CIPS (Bhattacharya, 2015). **Ketiga**, uji kointegrasi menggunakan metode *panel cointegration test* yang diusulkan oleh Pedroni (Bhattacharya, 2015) dimana panjang *lag* ditentukan menggunakan *automatic lag selection* berdasarkan nilai *schwartz information criterion* (SIC). *Lag* optimal ditentukan berdasarkan nilai MBIC, MAIC, dan MQIC terendah (Abrigo dan Love, 2015). **Keempat** adalah meregresi model panel VAR. Setelah hasil estimasi diperoleh, model panel VAR yang diperoleh akan diuji stabilitasnya dengan melihat nilai Eigen yang dihasilkan oleh model tersebut. **Kelima**, analisis *impulse response function* (IRF) dilakukan untuk melihat guncangan dari suatu variabel lain dan berapa lama pengaruh tersebut terjadi. Terakhir, **keenam** adalah analisis *variance decomposition*. *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) mengindikasikan seberapa besar kontribusi informasi setiap variabel terhadap variabel lain dalam model autoregresi. FEVD ini menentukan besaran *forecast error variance* dari setiap variabel yang dapat dijelaskan oleh guncangan eksogen terhadap variabel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif atas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	LGRDP	LAGRDP	LKUR	LPROD	LPOV	LRPOV
Mean	18.804	16.963	12.644	13.951	13.036	12.638
Median	18.609	16.908	12.639	14.023	12.858	12.549
Max.	21.603	19.370	15.424	16.985	15.526	15.112
Min.	16.522	14.059	9.8163	8.5124	11.124	10.031
Std. Dev.	1.1912	1.0834	1.2094	1.8421	1.0603	1.0913
Skewness	0.3895	0.0028	0.0265	-0.8456	0.5898	0.2146
Kurtosis	2.4895	2.8123	2.6546	3.7964	2.9605	2.8007
JB *test*	9.5405	0.3879	1.3431	38.439	15.322	2.3883
P-*value*	0.0085	0.8237	0.5109	0.0000	0.0005	0.3029
Sum	4964.3	4478.2	3338.1	3683.1	3441.6	3235.3
Sum Sq. Dev.	373.18	308.72	384.68	892.39	295.68	303.68
Obs.	264	264	264	264	264	256

Sumber: Diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.0.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari enam variabel yang digunakan hanya tiga variabel memenuhi asumsi distribusi normal yakni variabel LAGRDP, LKUR, dan LRPOV. Variabel LGRDP dan LPOV memperlihatkan adanya pengelompokan data pada ekstrem kanan. Hal ini menandakan bahwa lebih banyak provinsi yang memiliki PDRB dan jumlah penduduk miskin di atas rata-rata agregat. Sebaliknya, variabel LPROD justru menunjukkan pengelompokan data yang sangat besar pada ekstrem kiri. Hal ini menandakan jumlah provinsi yang memiliki produksi padi dan palawija di bawah rata-rata jauh lebih besar daripada yang di atas rata-rata agregat.

Rata-rata produksi padi dan palawija seluruh provinsi dalam kurun tahun 2010-2017 adalah 3.621.931 ton/tahun. Dari 33 provinsi, hanya 7 provinsi yang memiliki produksi padi dan palawija di atas rata-rata agregat yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Rata-rata produksi paling besar dipegang oleh provinsi Jawa Timur dengan jumlah produksi 22.673.885 ton/tahun kemudian disusul oleh Jawa Tengah (17.849.076 ton/tahun), Jawa Barat (15.652.613 ton/tahun), Lampung (13.079.105 ton/tahun), dan Sulawesi Selatan (7.456.322 ton/tahun).

Walaupun tiga besar rata-rata produksi padi dan palawija dipegang oleh provinsi di regional Jawa, rata-rata PDRB sektor pertanian di regional Sumatera lebih besar daripada regional Jawa. Rata-rata PDRB sektor pertanian per tahun di regional Sumatera sebesar Rp 507 triliun, sementara regional Jawa hanya Rp 489 triliun (Tabel 2). Hal ini disebabkan produksi sektor pertanian di regional Sumatera didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama karet, kelapa, dan kelapa sawit (BPS).

Tabel 2. Rata-rata PDRB Agregat dan PDRB Sektor Pertanian per Tahun

Regional	PDRB Sektor Pertanian (dalam juta rupiah)	PDRB Agregat (dalam juta rupiah)	% PDRB sektor pertanian
Sumatera	507.015.296	2.296.194.404	22,08%
Jawa	489.090.145	5.898.515.801	8,29%
Bali dan Nusra	62.109.987	303.854.270	20,44%
Kalimantan	103.370.218	862.164.573	11,99%
Sulawesi	152.036.457	582.938.922	26,08%
Papua dan Maluku	36.013.560	246.396.920	14,62%

Sumber : Diolah dari BPS (2018).

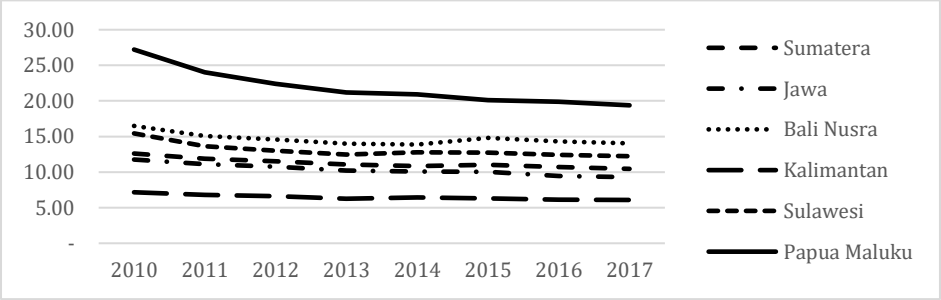
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Selama periode 2010-2017, KUR sektor pertanian lebih banyak disalurkan ke regional Jawa. Total KUR sektor pertanian ke regional Jawa adalah sebesar Rp 77,283 triliun dengan tiga provinsi terbesar yaitu Jawa Timur (Rp 26,07 triliun), Jawa Tengah (Rp 24,28 triliun), dan Jawa Barat (Rp 15,76 triliun). Jumlah tersebut merupakan 46,67% dari total penyaluran KUR ke sektor pertanian di seluruh Indonesia selama tahun 2010-2017 yang sebesar Rp 165,63 triliun. Regional Sumatera menerima penyaluran KUR ke sektor pertanian sebesar Rp 44,104 triliun (26,63%) dan sebesar Rp 44,24 triliun sisanya tersebar ke regional-regional lain. Regional Papua dan Maluku mendapatkan porsi paling kecil yaitu 2,67% atau hanya Rp 3,798 triliun.

Penyaluran KUR ke sektor pertanian mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. *Compunding annual growth rate* (CAGR) KUR ke sektor pertanian secara nasional adalah 21,77% per tahun. Meskipun penyaluran KUR paling besar berada di regional Jawa, pertumbuhan paling cepat justru berada di regional Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) dengan CAGR sebesar 31,13% per tahun, sedangkan regional Jawa hanya memiliki CAGR sebesar 19,81% per tahun. Urutan kedua diraih oleh regional Sulawesi dengan CAGR sebesar 29,19% per tahun. Sebagai regional dengan nilai KUR sektor pertanian terkecil, Papua dan Maluku memiliki CAGR sebesar 13,28% per tahun. Pertumbuhan paling kecil berada di regional Kalimantan dengan CAGR sebesar 7,58% per tahun.

Sebaran penduduk miskin di Indonesia juga masih terkonsentrasi di regional Jawa. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa 53,25% dari total penduduk miskin di Indonesia berada di regional Jawa dengan jumlah 14.789.430 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.647.850 jiwa merupakan penduduk miskin di pedesaan.

Walaupun jumlah penduduk miskin di regional Jawa terlihat begitu besar, tingkat kemiskinan agregat (persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk) di regional Jawa menempati urutan terendah kedua di Indonesia. Tingkat kemiskinan agregat terendah diraih oleh regional Kalimantan dengan persentase 6,09% pada tahun 2017. Tingkat kemiskinan pedesaan (persentase jumlah penduduk miskin pedesaan terhadap total penduduk desa) di regional Kalimantan juga paling rendah yaitu sebesar 7,85%. Sementara, tingkat kemiskinan agregat di regional Jawa sebesar 9,29% dengan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 13,21%.



Sumber: Diolah dari BPS (2018)

Gambar 4 Tingkat Kemiskinan Agregat Per Regional 2010-2017

Selama tahun 2010-2017, Gambar 4, tingkat kemiskinan di regional Papua dan Maluku selalu menempati posisi teratas. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Papua Maluku sebesar 19,38% dengan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 26,80%. Jumlah penduduk

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

miskin di Papua dan Maluku sebanyak 1.523.050 jiwa dan 1.399.940 (91,91%) di antaranya berada di pedesaan.

Pengujian Model Estimasi

Uji dependensi *cross sectional* akan menggunakan uji Pesaran CD dengan hipotesis *null* (H_0) yang digunakan dalam uji pesaran CD adalah tidak ada dependensi *cross sectional*. Dari hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Tabel 3, semua variabel yang diteliti menunjukkan *p-value* yang kurang dari nilai signifikansi 5% sehingga H_0 dapat ditolak. Dengan demikian, pengujian menyimpulkan bahwa semua variabel yang diteliti memiliki dependensi *cross sectional*. Hal ini berarti terdapat ketergantungan antar provinsi di setiap variabel yang diteliti.

Tabel 3. Hasil Pengujian Pesaran CD

	LGRDP	LAGRDP	LKUR	LPROD	LPOV	LRPOV
Pesaran CD	63.78143	64.28570	48.42986	15.01982	7.617195	5.514473
P-*value*	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

Karena semua variabel yang diuji memiliki dependensi *cross sectional*, uji CIPS akan digunakan dalam uji *unit root*. Hipotesis *null* (H_0) yang digunakan dalam pengujian ini adalah *homogeneous non-stationary* yang berarti bahwa terdapat *unit root* pada variabel yang menyebabkan tidak stasioner. Pengujian dilakukan dengan memasukkan konstan tanpa tren pada *lag* 1. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, Tabel 4, semua variabel signifikan pada *first difference* I(1), kecuali LGRDP signifikan pada *second difference* I(2).

Tabel 4. Hasil Pengujian Pengujian CIPS

	LGRDP	LAGRDP	LKUR	LPROD	LPOV	LRPOV
CIPS (*level*)	-2.039	-2.113	-1.509	-1.957	-2.249*	-1.970
CIPS (*first difference*)	-2.150	-2.918***	-2.396**	-3.076***	-3.761***	-3.109***
CIPS (*second difference*)	-2.786***	-3.347***	-2.745***	-2.994***	-3.959***	-3.835***

Catatan: signifikan di *10%, **5% dan ***1%

Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

Pada uji kointegrasi, Tabel 5, variabel-variabel pada model, 1 dan 2, yang menghubungkan KUR dan GRDP baik agregat maupun sektor pertanian sama-sama tidak terdapat kointegrasi. Sementara, variabel-variabel pada model, 3 dan 4, yang menghubungkan KUR dan kemiskinan (POV) baik di Indonesia maupun di pedesaan sama-sama terdapat kointegrasi. Hanya saja, hasil *Vector Error Correction Model* (VECM), yang sebaiknya digunakan jika ada kointegrasi, tidak menghasilkan regresi yang optimum, sehingga regresi modal 3 dan 4 tetap menggunakan VAR. Selanjutnya, panjang *lag* yang diambil untuk digunakan dalam estimasi keempat model panel VAR adalah 1. Hal ini disebabkan nilai MBIC, MAIC, dan MQIC pada lag tersebut paling kecil. Selanjutnya, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai *eigen* pada semua model yang digunakan kurang dari 1, sehingga semua estimasi model panel VAR yang diperoleh adalah stabil dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh jangka panjang.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Tabel 5. Hasil Estimasi Empat Model

	1. KUR - GRDP	2. KUR - AGRDP	3. KUR - POV	4. KUR - RPOV
Dependen	D2.LGRDP	D_LAGRDP	D_LPOV	D_LRPOV
Kointegrasi	x	x	v	v
lag	1	1	1	1
D_LKUR L1.	0.0062172	0.0250156***	-0.0174966**	-0.0096506
D_LPROD L1.	0.035741	0.0128898	-0.1793671**	-0.2605371**
D2_LGRDP L1.	-0.2187599*			
D_LAGRDP L1.		0.1675885		
D_LPOV L1.			0.085421	
D_LRPOV L1.				0.1119278
Eigen value	0.5033662	0.7151594	0.5020277	0.5719277

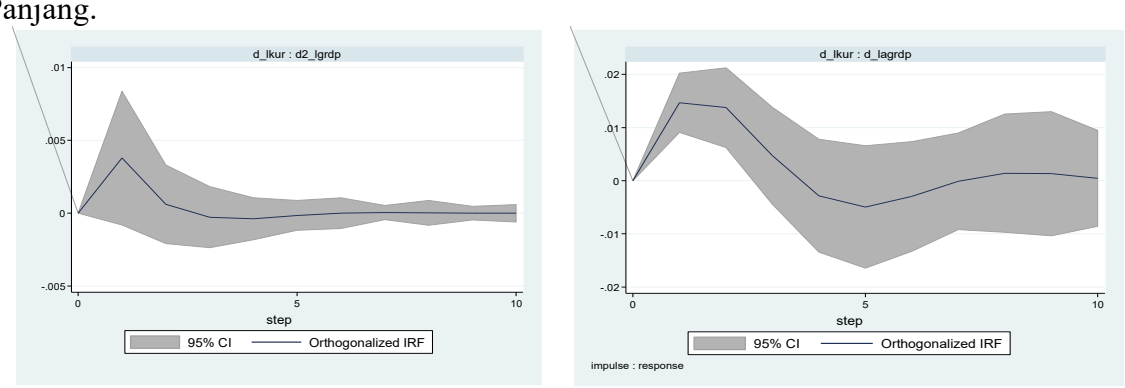
Catatan: signifikan di *10%, **5% dan ***1%

Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

1. KUR dan GRDP

Berdasarkan hasil estimasi pada model 1 dan 2, Tabel 5, KUR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun di sektor pertanian. Secara keseluruhan, peningkatan 1% KUR satu tahun sebelumnya akan meningkatkan 0,006% GRDP di tahun berjalan, namun tidak signifikan. Sementara khusus di sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meningkat 0,025% dengan adanya peningkatan 1% KUR di tahun lalu dengan taraf signifikan 1%.

Berikutnya, Gambar 5 menunjukkan hasil IRF atas perubahan KUR yang direspon oleh GRDP secara agregat (kiri) dan sektor pertanian (kanan). Secara keseluruhan, Gambar 5 menunjukkan guncangan pada KUR akan berefek peningkatan GRDP sektor pertanian di 2 tahun awal, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang hanya 1,6% variasi pada aggregat GRDP dapat dijelaskan oleh kondisi KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 1,5% variasi aggregat GRDP di jangka Panjang.



Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Stata 14.2

Gambar 5. Grafik IRF Variabel d_LKUR terhadap d2_LGRDP dan d_LAGRDP

Selanjutnya, pada seKtor pertanian, guncangan pada KUR akan berefek peningkatan GRDP di 3 tahun awal, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang hanya 32,9% variasi GRDP sektor pertanian dapat dijelaskan oleh kondisi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

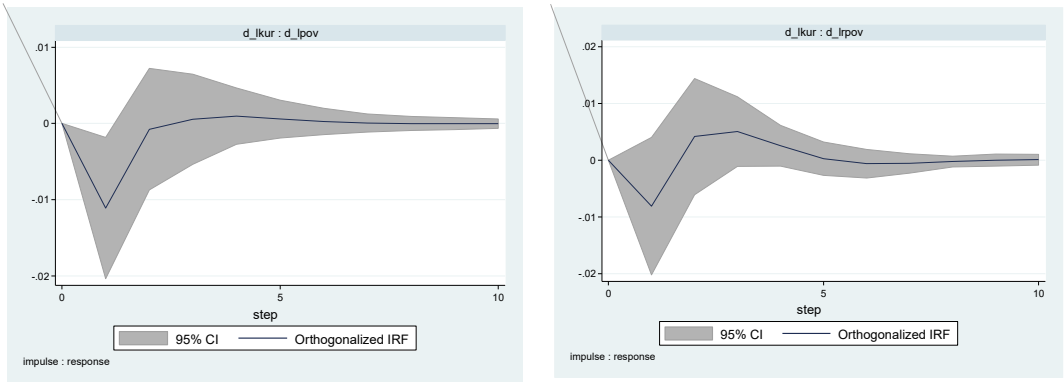
KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 5,4% variasi GRDP sector pertanian di jangka Panjang.

Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan (guncangan) pertumbuhan nilai penyaluran KUR sektor pertanian akan menyebabkan efek yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB agregat. Efeknya akan terasa pada tahun-tahun awal saja kemudian akan stabil pada jangka panjang. Sementara secara aggregat, pertumbuhan nilai penyaluran KUR sektor pertanian akan menyebabkan efek yang relatif signifikan terhadap pertumbuhan PDRB dan efeknya akan terasa pada lima tahun pertama kemudian akan stabil pada jangka panjang.

2. KUR dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi pada model 3 dan 4, Tabel 5, KUR berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin baik di Indonesia maupun di pedesaan. Secara aggregat, kenaikan 1% pada penyaluran KUR sektor pertanian pada tahun ini akan mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk miskin Indonesia satu tahun mendatang sebesar 0.017% dengan tingkat signifikansi 5%. Sementara di pedesaan, kenaikan 1% pada penyaluran KUR sektor pertanian pada tahun ini tidak berpengaruh signifikan.

Berikutnya, Gambar 6 menunjukkan hasil IRF atas perubahan KUR yang direspon oleh jumlah penduduk miskin di Indonesia (kiri) dan di pedesaan (kanan). Pada sektor pertanian, Gambar 6 menunjukkan guncangan pada KUR akan berefek penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun pertama, setelah fluktuatif ditahun-tahun awal efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang hanya 4,1% variasi pada jumlah penduduk miskin Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 11,5% variasi jumlah penduduk miskin Indonesia di jangka Panjang.



Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Stata 14.2

Gambar 6. Grafik IRF Variabel d_LKUR terhadap d_LPOV dan d_LRPOV

Selanjutnya, di pedesaan, guncangan pada KUR akan berefek penurunan jumlah penduduk miskin di tahun pertama, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang hanya 2,3% variasi jumlah penduduk miskin pedesaan dapat

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

dijelaskan oleh perubahan KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 13,5% variasi GRDP sektor pertanian di jangka Panjang.

Hal ini berarti, perubahan penyaluran KUR sektor pertanian dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan pada jangka pendek kemudian setelah itu akan mengalami penurunan efek pada jangka menengah dan mencapai kestabilan pada jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi pada perubahan jumlah penduduk di Indonesia.

Pembahasan

Penyaluran KUR sektor pertanian memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDRB baik untuk sektor pertanian itu sendiri, maupun secara agregat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akram *et al.* (2008), Simsir (2012), dan Rehman *et al.* (2017). Masih sejalan dengan penelitian Akram *et al.* (2008), penyaluran KUR sektor pertanian berdampak terhadap penurunan kemiskinan agregat maupun di pedesaan. Secara garis besar, intervensi pemerintah terkait pembiayaan mikro dalam bentuk program KUR sektor pertanian merupakan langkah produktif yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

KUR Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan PDRB

Dampak positif KUR sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian dapat dijelaskan oleh argumen yang diberikan oleh Ashari (2009) dan Syukur *et al.* (dalam Supadi dan Sumedi, 2004). Ashari (2009) dan Syukur *et al*. (dalam Supadi dan Sumedi, 2004) menjelaskan bahwa petani (pelaku usaha sektor pertanian) membutuhkan modal untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara antara lain modernisasi alat-alat pertanian, pembelian bibit berkualitas unggul, dan pupuk. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan cara memperluas lahan tanam dan memperbaiki pola pemasaran hasil pertanian.

Di sinilah peran KUR sebagai sebuah solusi untuk menambah modal petani yang umumnya terbatas. Terutama ke petani miskin yang masih banyak di daerah pedesaan. Dengan disalurkannya KUR ke sektor pertanian, para petani akan mempunyai modal untuk melakukan ekspansi usaha sehingga meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Jika produktivitas meningkat, maka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga akan mengalami peningkatan (Supadi dan Sumedi, 2004).

Selain itu, KUR merupakan program dari pemerintah sehingga beban bunga yang diberikan harus memperhatikan kemampuan petani dalam membayar (Nugroho, 2016). Menurut Rehman *et al*. (2017) kredit pertanian dengan bunga rendah merupakan cara yang cepat untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, KUR sektor pertanian yang berbunga rendah dapat menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas dan ekonomi sektor pertanian.

Skema subsidi bunga memberikan keringanan beban bunga yang harus ditanggung petani. Beban bunga yang ditanggung petani juga mengalami tren penurunan yakni mulai dari 13% dan 22% pada masa skema IJP (2007-2014), kemudian menjadi 12% pada tahun 2015 ketika menggunakan skema subsidi bunga, sampai menjadi 9% pada tahun 2016-2017. Saat ini, petani hanya menanggung beban bunga sekitar 7% sesuai yang tercantum

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sementara sisa beban bunga harus ditanggung oleh pemerintah dari tahun ke tahun sampai KUR dibayar lunas oleh petani. Beban bunga KUR mikro yang ditanggung negara untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 9,5% dan 10,5% (Risalah Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tanggal 8 Desember 2017).

Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh KUR sektor pertanian terhadap PDRB agregat dan PDRB sektor pertanian pada tingkat signifikansi 5%. KUR sektor pertanian tidak berdampak terhadap pertumbuhan PDRB agregat namun berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Pemberian KUR sektor pertanian akan meningkatkan produktivitas sektor tersebut dan akan berefek pada peningkatan ekonomi sektoral, dalam penelitian ini PDRB sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian akan menggerek pertumbuhan ekonomi secara agregat dikarenakan kebiasaan para petani untuk membelanjakan surplus pendapatannya ke barang-barang non pertanian sehingga menaikkan permintaan atas barang-barang tersebut (Lewis, 1954 serta Mellor dan Ranade, 2006). Argumen ini merupakan dasar mengapa pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB agregat.

Fenomena pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian tidak berdampak signifikan disebabkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Indonesia dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB agregat. Sejak tahun 1970, ekonomi di Indonesia tidak lagi bertumpu pada sektor pertanian namun beralih ke sektor industri, jasa, dan perdagangan (Suryahadi *et al*., 2008). Terlebih lagi, rata-rata kontribusi sektor pertanian nasional selama tahun 2010-2017 yang hanya sebesar 13,24%. Dua hal inilah yang menyebabkan mengapa KUR sektor pertanian tidak berdampak signifikan terhadap PDRB agregat walaupun secara tanda terlihat berdampak positif.

KUR Sektor Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh KUR sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pengaruh negatif ini memberikan arti bahwa penyaluran KUR ke sektor pertanian membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Zhuang *et al*. (2009) menjelaskan bahwa salah satu cara mengurangi kemiskinan adalah pemberian kredit terhadap penduduk miskin. Pemberian kredit pada sektor pertanian akan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan (Lewis, 1954). Terlebih, fakta menunjukkan bahwa 37,57% penduduk Indonesia masih menggantungkan hidup di sektor pertanian (BPS, 2016). Hal-hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian berdampak dalam meningkatkan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor sehingga dapat meningkatkan penghasilan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru (Suryahadi *et al*., 2008 dan Hermawan, 2012), sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Lebih lanjut, 1% pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan akan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan sebanyak 0,07% (Suryahadi *et al*., 2008). Sehingga secara **tidak langsung**, penyaluran KUR ke sektor pertanian akan mengurangi jumlah penduduk miskin baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Disisi lain, penyaluran KUR ke sektor pertanian juga akan mengurangi tingkat kemiskinan melalui cara **langsung** yakni dengan menyalurkannya ke penduduk miskin. KUR merupakan bentuk kredit mikro (*microcredit*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang belum dilirik oleh pihak perbankan atau dengan kata lain belum *bankable*. Pemberian kredit kepada pelaku usaha miskin (*working poor*) akan menciptakan peluang serta meningkatkan kemampuannya untuk memperkaya dirinya sendiri (Kloppenburg, 2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan Imai *et al.* (2012) dan Lacalle-Calderon *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa kredit mikro ternyata secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sampai ke penduduk termiskin (*extreme poor*) di negara-negara yang dijadikan sampel.

Lebih lanjut, Imai *et al*. (2012) juga menambahkan bahwa kredit mikro tidak hanya dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu negara. Hal ini disebabkan kredit mikro dapat dijadikan sebagai bantalan oleh penduduk miskin ketika terjadi guncangan-guncangan terhadap ekonomi dan kesehatan mereka sehingga tidak terjatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam (Fields, 2001). Dengan kata lain, ketika penduduk miskin masih memiliki modal untuk memulai kembali usahanya ketika guncangan-guncangan tersebut melanda.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5%, ternyata penyaluran KUR sektor pertanian tidak berdampak dalam mengurangi penduduk miskin di pedesaan. Fenomena ini tentu saja berbalikan dengan temuan Akram *et al.* (2008) serta teori yang disebutkan oleh Mellor dan Ranade (2006), serta Suryahadi *et al.* (2008) yang menyatakan pemberian kredit berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan.

Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, terdapat indikasi bahwa KUR sektor pertanian lebih banyak disalurkan ke bukan pelaku usaha miskin. Dengan kata lain, penerima KUR telah memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat sektor pertanian memiliki risiko bawaan yang kompleks dan tinggi sehingga pihak perbankan sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian (Barry, Peter J. dan Lindon J. Robinson, 2001, serta Badiru, 2010). Lebih lanjut lagi, Indonesia masih didominasi oleh petani kecil yang memiliki lahan garapan kurang dari 0,5 hektar dan belum berorientasi kepada agribisnis dan agrobisnis sehingga menambah risiko usaha (Hermawan, 2012).

Kedua, penerima KUR sektor pertanian belum dapat mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penambahan penghasilan. Menurut Bank Indonesia (2015), pelaku usaha UMKM memiliki kendala di sumber daya manusia, antara lain: (i) kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru; (ii) kurangnya membaca kebutuhan pasar; (iii) pemasaran produk yang masih menggunakan cara tradisional (*mouth to mouth*); (iv) serta kurangnya perencanaan jangka panjang. Dengan demikian, upaya pendampingan bisnis juga diperlukan sebagai sarana pendukung KUR. Dalam tulisannya, Zhuang *et al.* (2009) dan Lacalle-Calderon *et al.* (2018) juga menekankan pentingnya sarana pendukung tersebut dalam meningkatkan pengaruh kredit mikro terhadap pemberantasan kemiskinan. Pendamping bisnis dapat berasal dari pemerintah, swadaya masyarakat, pelaku bisnis, maupun organisasi non pemerintah (NGO) yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat dan UMKM (Zhuang *et al.,* 2009).

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

Di Indonesia, kewajiban adanya pendampingan usaha bagi penerima KUR baru diatur dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2015. Dalam aturan ini, peran pembinaan pendampingan usaha diserahkan kepada kementerian/lembaga teknis terkait dan pemerintah daerah. Kewajiban pendampingan ini terus dibawa sampai ke Permenko Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku mulai tahun 2018 sehingga upaya pendampingan usaha bagi penerima KUR dari pemerintah baru berjalan selama tiga tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pendampingan usaha bagi penerima KUR terutama sektor pertanian.

Kondisi Penyaluran KUR Sektor Pertanian di Indonesia

Selama periode penelitian, penyaluran KUR sektor pertanian masih terpusat di regional Jawa (Tabel 6), meskipun rata-rata proporsi sektor pertanian di Jawa paling sedikit. Jika dilihat dari dampak positif KUR sektor pertanian terhadap pembangunan di Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan penyaluran KUR sektor pertanian ke regional-regional yang bergantung pada sektor pertanian dan masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Regional-regional tersebut adalah regional Papua dan Maluku, Sulawesi, serta Bali dan Nusra.

Selama tahun 2010-2017, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penyaluran KUR sektor pertanian ke regional-regional tersebut namun masih kurang optimal untuk regional Papua dan Maluku. Hal ini dapat dibuktikan dengan CAGR KUR sektor pertanian ke regional Bali dan Nusra serta regional Sulawesi yang berada di atas CAGR nasional yang sebesar 21,77%. Sementara, CAGR regional Papua dan Maluku masih berada di bawah CAGR nasional bahkan CAGR regional Jawa. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong para penyalur KUR untuk terus meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian ke regional-regional prioritas terutama regional Papua dan Maluku.

Tabel 6. Persentase PDRB Sektor Pertanian, Tingkat Kemiskinan, dan CAGR KUR Sektor Pertanian di Indonesia

Regional	Rata-rata %PDRB Sektor Pertanian	Tingkat Kemiskinan Agregat Tahun 2017	Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Tahun 2017	CAGR penyaluran KUR Sektor Pertanian
Sumatera	22,08%	10,45%	11,74%	27,18%
Jawa	8,29%	9,29%	13,21%	19,81%
Bali dan Nusra	20,44%	14,06%	15,12%	31.13%
Kalimantan	11,99%	6,09%	7,85%	7,58%
Sulawesi	26,08%	12,23%	15,12%	28,19%
Papua dan Maluku	14,62%	19,38%	26,80%	13,28%

Sumber : Diolah dari BPS (2018)

Di sisi lain, penyaluran KUR sektor pertanian di Indonesia masih ditangani oleh lembaga keuangan komersial umum. Dari 41 instansi penyalur KUR yang terdaftar, BRI Agroniaga merupakan satu-satunya lembaga keuangan komersial yang memiliki spesialisasi di sektor pertanian. Menurut Barry dan Lindon (2001), penyaluran kredit ke sektor pertanian sebaiknya dilakukan oleh lembaga keuangan yang terspesialisasi di bidang

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang membutuhkan modal besar (*capital-intensive*) tetapi juga memiliki karakter risiko kompleks yang disebabkan oleh likuiditas aset yang rendah, masa produksi yang lama, ketergantungan terhadap kontrak ke pihak ketiga, serta hasil panen yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Barry dan Lindon, 2001). Sehingga secara teori keuangan, pembentukan lembaga keuangan yang terspesialisasi di bidang pertanian merupakan langkah rasional untuk mengatasi risiko tersebut (Barry dan Lindon, 2001). Lebih lanjut lagi, Barry dan Lindon (2001) berargumen bahwa spesialisasi di sektor pertanian akan memudahkan lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Tingginya bias dalam penilaian kelayakan kredit usaha (*creditworthiness*) yang disebabkan oleh keasimetrisan informasi antara petani dan kreditur.
2. Sulitnya penilaian kinerja keuangan karena karakter pelaku usaha sektor pertanian yang jarang melakukan audit atas laporan keuangan mereka.
3. Tendensi petani untuk melakukan langkah-langkah nekat (*go-for-broke behavior*) ketika terjadi penambahan nilai utang sehingga kreditur harus berkemampuan lebih untuk melakukan pengawasan ekstra.

Temuan Lain yang Diperoleh dari Hasil Penelitian

Terdapat fenomena yang menarik untuk diperhatikan dalam penelitian ini. Keempat model estimasi panel VAR menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel d_LKUR dan d_LPROD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR sektor pertanian berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap produksi padi dan palawija. Pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian sebesar 1% tahun ini akan mengurangi pertumbuhan produksi padi dan palawija sebesar 0,059% tahun berikutnya. Fenomena ini tentu saja akan mengganggu pencapaian tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional jika tidak ada penanganan lebih lanjut.

Jika menggunakan argumen yang dikemukakan Ashari (2009) dan Syukur *et al.* (dalam Supadi dan Sumedi, 2004) bahwa kredit digunakan untuk optimalisasi produksi pertanian dan teori penciptaan kekayaan Kloppenburg (2009) bahwa kredit mikro menciptakan peluang untuk memperkaya diri sendiri, maka terdapat indikasi bahwa petani padi dan palawija cenderung untuk beralih ke sub sektor lain ketika menerima KUR sektor pertanian. Perkiraan penyebab terjadinya fenomena ini adalah produksi padi dan palawija memberikan keuntungan yang kecil bagi petani sehingga petani akan beralih ke tanaman atau bahkan sub sektor lain (peternakan, perkebunan, dll.) yang lebih menguntungkan daripada bertani padi dan palawija.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa pemberian KUR berdampak positif signifikan terhadap agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.025%, namun tidak signifikan pada sektor pertanian. Lebih lanjut lagi, KUR juga berdampak signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0.017%, namun tidak signifikan di pedesaan. Saran bagi Kementerian Perekonomian sebagai penanggung jawab program KUR adalah mempercepat penyaluran KUR pertanian khususnya regional Papua dan Maluku, menambah lembaga keuangan yang fokus pada penyaluran KUR, serta mempermudah akses pendampingan usaha bagi para petani baik dari pemerintah dalam

maupun luar negeri. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat lebih dalam terkait efektivitas penyaluran KUR baik dari sisi kredit maupun pendampingan yang diterima petani serta bank penyalur kredit. Terlebih untuk produksi padi dan palawija yang secara statistik terdampak negatif dari adanya KUR.

REFERENSI

Abrigo, Michael R.M. dan Inessa Love. (2015). *Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs*.

Akram, Waqar, Zakir Hussain, Hazoor M. Sabir, dan Ijaz Hussain. (2008). Impact of Agriculture Credit on Growth and Poverty in Pakistan (Time Series Analysis Through Error Correction Model). *European Journal of Scientific Research* 23, no. 2: 243-251.

Ashari. (2009). *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia.* Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Badiru, Idris O. (2010). Review of Smal Farmer Access to Agricultural Credit in Nigeria. *International Food Policy Research Institute Policy Note,* no.25. Abuja: IFPRI Abuja.

Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia.

Barry, Peter J. dan Lindon J. Robinson. (2001). Agricultural Finance: Credit, Credit Constraints, And Consequences. Penyunting Bruce L. Gardner dan Gordon C. Rausser. *Handbook of Agricultural Economics Vol. 1A*. North-Holland.

Bhattacharya, Mita, Md. Samsul Alam, Sudharshan Reddy Paramati, dan Muhammad Shahbaz. (2015). *Dynamics of Natural Gas Consumption, Output and Trade: Empirical Evidence from the Emerging Economics.* Departement of Economics. Monash Bussiness School.

Cooper, R. Donald dan Pamela S. Schindler. (2014). *Business Research Methods, Twelfth Edition*. New York: McGraw-Hill.

Fields, G. (2001). *Distribution and Development: A New Look at the Developing World*. New York: Russel Sage Foundation.

Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill.

Hermawan, Iwan. (2012). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Penurunan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *Mimbar* 28, no.2: 135-144.

Imai, Katsushi S., Raghav Gaiha, Ganesh Thapa, dan Samuel Kobina Annim. (2012). Microfinance and Poverty – A Macro Perspective. *World Development* 40, no. 8: 1675-1689.

Johansen, Soren. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford: Calrendon Press.

Kloppenburg, Norbert. (2009). *Microfinance Investment Funds: Where Wealth Creation Meets Poverty Reduction*. Penyunting Ingrid Matthaus-Maier dan J.D. von Pischke. *Microfinance Investment Funds, Leveraging Private Capital for Economic Growth and Poverty Reduction*. Berlin: Springer

Lacalle-Calderon, Maricruz, Manuel Perez-Trujillo, dan Isabel Neira. (2018). Does Microfinance Reduce Poverty Among The Poorest? A Macro Quantile Regression Approach. *The Developing Economies* 56, no.1: 51-65.

Lewis, W. Arthur. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester: The Manchester School.

Mellor, John W. dan Chandrashekhar Ranade. (2006). Why Does Agricultural Growth Dominate Poverty Reduction in Low and Middle-income Countries?. *The Pakistan Development Review* 45, no.2: 221-240.

Nugroho, Sidiq Suryo, Eko Wicaksono, dan Abdul Aziz. (2016). Analisis Penentuan Suku Bunga Kredit Program Sektor Pertanian dan Potensi Pengaruhnya Terhadap APBN. *Jurnal Borneo Administrator* 12, no.2: 171-190.

Pedroni, Peter. (1997). *Panel Cointegration – Asymtotic And Finite Sample Properties of Pooled Time Series Test With An Application To The PPP Hypothesis New Results*. Indiana University.

Rehman, Abdul, Abbas Ali Chandio, Imran Hussain, dan Luan Jingdong. (2017). Is Credit The Devil in The Agriculture? The Role of Credit in Pakistan's Agricultural Sector. *The Journal of Finance and Data Science* 3: 38-44.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach, Seventh Edition*. Chichester: Wiley.

Sigmund, Michael dan Robert Ferstl. (2017). *Panel Vector Autoregression in R: The panelvar Package*.

Simsir, Necmiye Comertler. (2012). An Econometric Analysis of The Relationships Between Economic Growth and Agricultural Credits For Pro-poor Growth in Turkey. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies* 4, no.2.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsono, Agus, Auliya Aziza, dan Wara Pramesti. (2017). Comparison of Vector Autoregressive (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) for Index of ASEAN stock price. *AIP Conference Proceedings* 1913, 020032

Supadi dan Sumedi. (2004). Tinjauan Umum Kebijakan Kredit Pertanian. *ICASERD Working Paper,* no. 25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma, dan Sudarno Sumarto. (2008). The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics* 89: 109-117.

Zhuang, Juzhong, Herath Gunatilake, Yoko Niimi, Muhammad Ehsan Khan, Yi Jiang, Rana Hasan, Niny Khor, Anneli S., Lagman-Martin, Pamela Bracey, dan Biao Huang. (2009). Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review. *ADB Economic Working Paper Series*, no. 173. Asian Development Bank.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.